

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Andik Sukaryanto^{1*}, Dian Wahyudin²

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹andiksukaryanto@gmail.com, ²zahidah181011@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 19, 2025

Revised : Mei 20, 2025

Accepted : Juni 12, 2025

Kata kunci :

Efektivitas;

Sistem Patroli;

Keamanan Terpadu;

Satpol PP;

Kecamatan Pulo Gadung;

ABSTRAK

Peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah perkotaan merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam mencapainya adalah melalui pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan Sipamanpadu di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program dan tantangan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Patroli Dan Keamanan Terpadu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur belum dapat efektif karena masyarakat kurang memahami tujuan dan mekanisme program patroli serta keterbatasan sumber daya dan penegakan hukum yang tidak konsisten menghambat pencapaian tujuan. Meskipun ada upaya untuk mengikuti jadwal patroli, ketidakkonsistenan dan penyesuaian terhadap kondisi lapangan masih menjadi tantangan dalam penentuan ketetapan waktu pelaksanaan patroli. maka dari itu Perubahan nyata yang dihasilkan dari program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu belum sepenuhnya optimal mengingat Beberapa masalah seperti tawuran dan keberadaan PKL yang kembali berjualan di lokasi yang sama menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi masih bersifat sementara.



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pemerintahan daerah dalam kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat merupakan hasil dari penyelenggaraan negara serta masyarakat itu sendiri dan dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Polisi dan TNI.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan tugas Satpol PP yaitu: menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Kepadatan penduduk yang terus meningkat dan ditambah dengan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di lingkup perkotaan, akan memicu banyaknya hal-hal baru yang muncul ditengah kehidupan masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, banyak sekali masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.

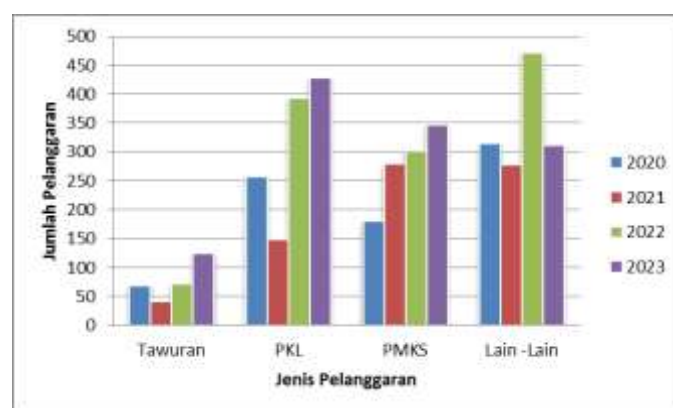
Berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung ,Kecamatan PoluGadung kini menjadi salah satu wilayah pusat industri di wilayah timur Jakarta yang paling pesat pertumbuhannya. Kawasan ini merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Timur meliputi 7 kelurahan yakni Kel.Pisangan Timur, Kel.Cipinang, Kel.Jatinegara, Kel.Jati, Kel.Rawamangun, Kel.Pulo Gadung dan Kel.Kelurahan Kayu Putih. Banyaknya populasi pertambahan penduduk di kecamatan Pulo Gadung tidak menutup kemungkinan banyak terjadi permasalahan terkait keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.

Salah satu permasalahan yang paling kompleks dan sering terjadi di kecamatan Pulo Gadung adalah tawuran antar pelajar menggunakan senjata tajam,dikutip dalam (tribunnews.com./2024/06/20) Tawuran dua kelompok warga di RW 08 kembali terjadi di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan parahnya dalam kejadian tersebut telah merenggut korban jiwa. Adanya kejadian ini sangat mengganggu keamanan baik warga kecamatan Pulo Gadung ataupun masyarakat lainnya karena akibat dari tawuran tersebut banyak warga dan masyarakat merasa was-was dan cemas.

Selain itu adanya permasalahan lain seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Anak Jalanan, Asongan, Gelandangan, Pengamen, Pengemis, Pyskotik/Stress, Terlantar, dan lain-lainya kerap kali berkeliaran di sekitar wilayah kecamatan Pulo Gadung terutama pada terminal Pulo Gadung. Keberadaan PMKS ini menjadi kendala dan hambatan dalam mencapai ketentraman dan ketertiban umum karena tidak jarang para PMKS seperti Anak Jalanan, Pengemis, Gelandangan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat dan dinilai sering mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perilaku menyimpang yang dilakukan seperti kejahatan, kenakalan remaja, pencurian, minum-minuman keras, perjudian, penggunaan obato-batan terlarang, adalah fenomena sosial yang sejak dari dahulu kala dideskripsikan pada masyarakat sebagai stigma negative dalam keamanan suatu wilayah. Kemudian selain itu banyaknya pedagang kaki Lima (PKL) di sepanjang trotoar wilayah Kecamatan Pulo gadung yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Fenomena pedagang kaki lima dimana di sepanjang jalan terdapat toko-toko dan di bawah jembatan tol dan menempati trotoar di sepanjang jalan tersebut yang mengakibatkan kemacetan di siang maupun sore hari yang menyebabkan masyarakat merasa kesulitan dalam beraktifitas. Bedasarkan data yang telah peneliti dapatkan peneliti telah membentuk diagram jumlah pelanggaran keamanan, ketertiban dan ketentraman umum di Wilayah Kecamatan Pulo Gadung

Diagram 1. Data Pelanggaran Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Umum Di Wilayah Kecamatan Pulo Gadung



Sumber : Data satuan polisi pamong praja Jakarta Timur

Dari data di atas diketahui jika pelanggaran keamanan, ketertiban dan ketentraman umum di Wilayah Kecamatan Pulo Gadung kerap kali terjadi dan bahkan di setiap tahunnya hampir setiap permasalahan mengalami kenaikan jumlah data pelanggaran. Data ini didasarkan atas tindakan yang telah dilakukan pihak satpol PP maupun laporan keluhan dalam masyarakat yang sangat terganggu dengan banyaknya para pelanggar seperti pengemis yang terkadang memaksa dalam meminta,

gelandangan yang tidur dan berdiam di depan toko, PKL disepanjang trotoar dan di perkirakan masih banyak permasalahan lainnya yang luput dari pengawasan pihak satpol PP.

Kemudian Sikap para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan kurang kooperatif dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Situasi perekonomian yang masih rentan (belum kondusif), lapangan kerja yang sempit, pendapatan masyarakat yang rendah, dan urbanisasi penduduk dari berbagai wilayah/daerah, Pertambahan pemukiman dan pertambahan sarana transportasi terutama sarana transportasi publik dan Semakin maraknya tindakan prostitusi dan pedagang minuman beralkohol secara ilegal di wilayah Pulo Gadung.

Walaupun sudah sering kali di tertibkan Pedagang kaki lima tidak memperdulikan aturan-aturan maupun norma-norma yang telah ditetapkan, karena kebanyakan dari mereka beranggapan di tempat-tempat tersebutlah mereka bisa mendapatkan penghasilan meskipun mereka menyadari tempat mereka berjualan tidak mendapat izin. Lebih parahnya apabila Ada jiwa-jiwa emosional yang tidak terima jika petugas memberikan pemahaman tentang peraturan yang di tetapkan, dan merasa pihak satpol PP tidak memiliki belas kasihan. Kejadian ini banyak di temukan karena adanya profokator yang membakar emosi para pedagang kaki lima jika akan di tertibkan yang menyebabkan kesalah pahaman para pegadang yang memberontak pihak satpol PP.

Untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang terjadi di kecamatan Pulo Gadung tersebut maka dibentuklah Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu di jalur-jalur rawan potensi pelanggaran keamanan, ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Program kebijakan ini di sebut dengan kegiatan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (SIPAMANPADU). Program Sipamanpadu adalah suatu Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu di jalur-jalur rawan potensi pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersama dengan TNI, POLISI, SATPOL PP dan Dinas Perhubungan. Kegiatan kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara ketiga lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yang telah di tentukan.

Program Sipamanpadu ini di implementasikan dengan tujuan untuk mewujudkan Keamanan dan Ketertiban serta tujuan sistem ini untuk meningkatkan kehadiran aparat keamanan di tengah-tengah masyarakat sebagai pencegahan timbulnya kriminalitas dan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tujuan memberi rasa aman, perlindungan, dan pengayom masyarakat maupun wisatawan

Selain melakukan patroli di sepanjang wilayah Kecamatan Pulo Gadung pihak satpol PP juga membina beberapa pedagang asongan, kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, selain itu juga menertibkan pengendara motor dan mobil yang parkir sembarangan di atas trotoar. Program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) ini di lakukan secara terjadwal dan kegiatannya sering kali dilakukan pada malam hari melalui patroli bersama-sama sekaligus juga dalam patroli bila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu gangguan umum dan ketentraman sosial langsung ditangani saat itu juga .

Adanya program kebijakan ini di harapkan dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Program patroli sipamanpadu ini akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, terutama menjelang hari-hari besar yang biasanya menjadi waktu rawan peningkatan tindak kriminal. Dari adanya kebijakan ini penulis tergerak untuk melakukan penelitian tentang efektivitas program kebijakan Sipamanpadu (Sistem Patroli Dan Keamanan Terpadu) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah kecamatan Pulo Gadung yang memiliki banyak permasalahan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Berdasarkan dengan uraian latar belakang serta penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Sistem Patroli Dan Keamanan Terpadu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur”

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektivitas Program

Dalam memaknai efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang, dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut diakui oleh Chung dan Maginso yang dikutip oleh

Mulyasa (2018;38) mengatakan bahwa "efektivenes means different to different people". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Jadi efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Steers (Edy, 2020:123), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang berkaitan: (1) optimalisasi tujuan-tujuannya, (2) persektif sistem dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Dengan rancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan untuk diketahui berbagai macam tujuan yang ingin dicapai maka optimalisasi tujuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan rancangan sistem ialah dengan menggunakan sistem terbuka, yaitu suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya.

Sistem mencakup tiga komponen : input, proses dan output. Kemudian yang dimaksud dengan tekanan pada segi perilaku manusia bahwa setiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Dengan kata lain efektif tidaknya sebuah perusahaan sangat tergantung dari faktor manusiannya. Kotler, Rosmaniar (2022:4) mendefinisikan efektivitas sebagai tujuan yang diinginkan atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

2. Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2022: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya".

(Samodra Wibawa, 2023 : 610) Teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang dipilih oleh peneliti ini karena masih relevan digunakan di masa sekarang dalam aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus di evaluasi. Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Secara spesifik William Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya. (Wibawa, 2023) 31 Teori "Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan" mengacu pada pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik.

Dengan menggunakan tiga pendekatan evaluasi ini, evaluasi implementasi kebijakan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejauh mana kebijakan berhasil diterapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2018:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2019: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai " is whatever government choose to do or not to do" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

3. Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu

Sistem Patroli Dan Keamanan Terpadu adalah suatu Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu di jalur-jalur rawan potensi pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersama dengan TNI, POLISI, SATPOL PP dan Dinas Perhubungan. Kegiatan kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara ketiga lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yang telah di tentukan.

Patroli terpadu ini difokuskan di beberapa titik rawan tindak kejahatan, termasuk area permukiman, jalan utama, serta tempat-tempat yang sering menjadi pusat keramaian. Dalam operasi ini, petugas melakukan dialog interaktif dengan masyarakat, memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan.

Patroli ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, terutama menjelang hari-hari besar yang biasanya menjadi waktu rawan peningkatan tindak kriminal.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan kentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, Secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintahan Daerah dengan bentuk kesatuan yang bertugas mengatur dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dengan fungsi utama menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP berkedudukan di daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Lain halnya di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati atau Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Satpol PP atau tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja setiap daerah berbeda-beda tergantung peraturan daerah di mana Satpol PP itu bernaung. Ketenteraman dan ketertiban umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 mengenai kondisi yang memungkinkan anggota daerah atau petugas daerah mengerjakan tugas yang teratur, tertib serta tentram yakni pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menurut Winardi (2018, Hal.29).

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka peneliti menetapkan jenis penelitian yang diambil menggunakan penelitian eksploratif (*exploratory research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode deskriptif studi kasus. Metode deskriptif studi kasus dengan penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).

Penulis secara langsung melaksanakan wawancara dengan yang bersangkutan, serta melakukan observasi secara langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian guna memilih data mana yang menurut peneliti relevan dan tidak relevan agar tidak di masukan kedalam sejumlah data-data yang sedang dikumpulkan oleh peneliti sekalipun data itu memiliki informasi yang menarik Moleong (2018:237). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini berfokus pada :

1. Keefektifan pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Timur

2. Hambatan-hambatan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis efektivitas sistem patrolling yang diterapkan di Kecamatan Pulo Gadung dalam mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalankan tugasnya serta melihat seberapa besar pengaruh program ini terhadap persepsi masyarakat terhadap keamanan di wilayah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan keamanan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta memperkuat sinergi antar lembaga terkait dalam menciptakan Pulo Gadung yang lebih aman dan tertib.

Tabel 1. Dampak Program Sipamanpadu terhadap Keamanan dan Ketertiban dengan Kekurangan yang Teridentifikasi

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Sebelum Pelaksanaan Program Sipamanpadu	Sesudah Pelaksanaan Program Sipamanpadu	Persentase Pengurangan	Catatan / Kekurangan
Tawuran Antar Pelajar	8 kasus per bulan	5 kasus per bulan	37.5%	Meskipun ada penurunan, tawuran masih terjadi pada jam-jam tertentu yang tidak terjangkau patroli.
Pencurian (Rumah/Toko)	12 kasus per bulan	8 kasus per bulan	33.3%	Pencurian masih terjadi, terutama di area yang tidak dijangkau patroli rutin.
Pencurian Kendaraan Bermotor	5 kasus per bulan	4 kasus per bulan	20%	Keamanan kendaraan masih menjadi masalah di area parkir yang tidak diawasi.
Penyalahgunaan Narkoba	7 kasus per bulan	5 kasus per bulan	28.6%	Penggunaan narkoba masih terdeteksi meskipun patroli meningkat di malam hari.
Penyebaran Pengemis Paksa dan PMKS	15 kasus per minggu	12 kasus per minggu	20%	Penertiban pengemis dan PMKS masih kurang efektif di beberapa titik keramaian, seperti pasar dan terminal.
Pelanggaran PKL di Trotoar	20 kasus per minggu	15 kasus per minggu	25%	Pedagang kaki lima masih mengabaikan peraturan, terutama di jam sibuk, meskipun sudah sering ditertibkan.
Kemacetan Lalu Lintas	10 kejadian per minggu	7 kejadian per minggu	30%	Kemacetan masih terjadi di beberapa titik, terutama di sekitar pasar dan pusat perbelanjaan.
Premanisme dan Kejahatan Jalanan	10 kejadian per bulan	6 kejadian per bulan	40%	Premanisme berkurang, namun masih ada gangguan terutama pada malam hari di area tertentu.

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Sebelum Pelaksanaan Program Sipamanpadu	Sesudah Pelaksanaan Program Sipamanpadu	Persentase Pengurangan	Catatan / Kekurangan
Pelanggaran Parkir Sembarangan	18 kasus per minggu	14 kasus per minggu	22.2%	Masih ada pelanggaran parkir yang sulit diatasi, terutama di area yang padat.
Tindak Kejahatan Umum (Perkelahian, Penganiayaan)	12 kasus per bulan	9 kasus per bulan	25%	Kejahatan umum berkurang, namun masih terdapat kekurangan dalam pengawasan di beberapa tempat rawan.
Tindakan Premanisme (Pengutipan Paksa)	6 kasus per bulan	5 kasus per bulan	16.7%	Masih ada indikasi premanisme meskipun ada patroli, terutama di malam hari.

Sumber : Diolah Penulis

Meskipun program Sipamanpadu memberikan dampak positif dalam pengurangan berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan pada beberapa kategori, seperti pencurian dan pengemis paksa (PMKS). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada patroli yang lebih sering, beberapa kejahatan masih terjadi pada jam atau lokasi yang tidak terjangkau oleh pengawasan. Terkait dengan pengawasan dan koordinasi terhadap PMKS dan pedagang kaki lima (PKL), meskipun patroli rutin dapat mengurangi jumlah PKL di trotoar dan PMKS, penertiban terhadap pengemis paksa dan pedagang kaki lima masih belum sepenuhnya efektif.

Di beberapa titik seperti pasar, terminal, dan area keramaian lainnya, pengawasan masih terbilang kurang. Pedagang kaki lima sering kembali berjualan di lokasi yang sama meskipun sudah ada penertiban. Begitu pula dengan masalah keamanan kendaraan dan pencurian, meskipun ada penurunan pada kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian toko, masih terdapat beberapa celah pengawasan, terutama di area parkir yang tidak diawasi, yang menyebabkan masalah keamanan kendaraan di beberapa titik rawan belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam hal premanisme dan kejahatan jalanan, meskipun ada pengurangan, gangguan kriminalitas pada malam hari masih dapat dicegah lebih baik jika pengawasan lebih intensif pada jam-jam rawan.

Patroli malam hari sudah cukup efektif, namun keterbatasan jumlah personel yang tersedia untuk mengawasi setiap titik rawan menjadi kendala. Salah satu kekurangan terbesar dalam implementasi program ini adalah kurangnya jumlah personel pada jam-jam rawan dan di titik-titik yang memerlukan pengawasan lebih. Meskipun sudah ada koordinasi yang baik dengan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan, masih diperlukan lebih banyak personel untuk mengatasi kekurangan dalam pengawasan yang ada.

1. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Patroli Dan Keamanan Terpadu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin pemerintah. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, Satpol PP Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, melaksanakan kebijakan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu). Penelitian ini menganalisis efektivitas program tersebut berdasarkan lima aspek teori Sutrisno (2021): pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Temuan menunjukkan adanya kendala seperti kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan masyarakat, keterbatasan anggaran serta fasilitas, dan masih adanya area rawan gangguan yang belum terjangkau. Selain itu, dinamika sosial dan keragaman karakter masyarakat menjadi tantangan tambahan. Penelitian ini bertujuan menggali efektivitas Sipamanpadu dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat, sekaligus memberikan evaluasi dan

rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan strategi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

a) Pemahaman program

Program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum di Kecamatan Pulo Gadung. Pelaksanaan program ini melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Satpol PP, TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Tujuan utama program adalah menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat melalui pendekatan yang bersifat preventif dan represif.

Pemahaman terhadap program ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasinya. Aparat pelaksana seperti Satpol PP perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat program. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami esensi program agar dapat mendukung pelaksanaannya dan mengurangi resistensi. Sosialisasi menjadi kunci untuk menyampaikan informasi program secara efektif kepada berbagai pihak.

Wawancara dengan aparat Satpol PP, seperti Agung Triyoga, Martua Manik, Ngadimun, Mardanih, dan Adhi Wiguno, menunjukkan bahwa meskipun mereka memahami inti program sebagai upaya preventif untuk menciptakan ketertiban, mereka menghadapi tantangan dalam komunikasi dengan masyarakat. Aparat menilai pentingnya meningkatkan koordinasi dan memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan utama Sipamanpadu, yang tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran tetapi juga pencegahan.

Dari perspektif masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL), seperti yang disampaikan oleh Dede Kurniawan dan Anjar, terdapat apresiasi terhadap manfaat program dalam menciptakan rasa aman, terutama di area ramai seperti pasar dan terminal. Namun, pemahaman masyarakat terhadap Sipamanpadu masih terbatas, dengan banyak yang hanya melihat sisi penindakan tanpa menyadari adanya koordinasi lintas instansi atau langkah preventif yang diambil.

Kesimpulannya, pemahaman terhadap Program Sipamanpadu belum optimal di kalangan aparat maupun masyarakat. Sosialisasi yang lebih intensif dan komunikasi yang lebih baik diperlukan untuk memperjelas tujuan program, membangun dukungan, dan mengurangi resistensi. Upaya ini penting untuk memastikan program dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

b) Tepat Sasaran

Implementasi program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai sasaran yang tepat. Program ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menanggulangi masalah seperti pedagang kaki lima (PKL), penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta gangguan ketertiban lainnya.

Namun, meskipun sudah ada upaya untuk memfokuskan patroli pada titik-titik rawan pelanggaran, seperti terminal dan kawasan PKL, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu patroli yang kurang terjadwal menjadi kendala utama dalam menjaga keberlanjutan program ini. Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang tidak konsisten menyebabkan beberapa sasaran, seperti penertiban PKL dan penanggulangan PMKS, belum sepenuhnya maksimal.

Selain masalah teknis, program ini juga menghadapi keluhan dari masyarakat dan pelaku PKL. Banyak yang merasa bahwa meskipun penertiban dilakukan, tidak ada solusi jangka panjang yang jelas, seperti penyediaan tempat berjualan yang layak bagi PKL. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan, karena meskipun program bertujuan menciptakan ketertiban, tidak ada langkah konkret untuk mengatasi kebutuhan mereka.

Indikator "tepat sasaran" yang dibahas di atas menunjukkan bahwa implementasi program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) di Kecamatan Pulo Gadung belum optimal dalam mencapai efektivitas yang diharapkan. Meskipun patroli sudah difokuskan pada titik-titik rawan pelanggaran, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaktepatan jadwal patroli, serta ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum menghambat pencapaian tujuan program secara maksimal. Selain itu, keluhan dari masyarakat dan pelaku PKL mengenai kurangnya solusi jangka panjang juga mempertegas bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

c) Tepat Waktu

Indikator tepat waktu memainkan peran penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu oleh Satpol PP di Kecamatan Pulo Gadung. Tepat waktu mencerminkan kedisiplinan dan kemampuan tim dalam merespons gangguan keamanan dan ketertiban secara efisien. Kecepatan dalam melaksanakan patroli sesuai jadwal dan merespons laporan masyarakat menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

Menurut para petugas Satpol PP, indikator tepat waktu meliputi konsistensi dalam menjalankan jadwal patroli dan kecepatan dalam menanggapi laporan masyarakat. Beberapa pihak mencatat pentingnya fleksibilitas, terutama saat ada laporan yang mendesak yang membutuhkan respons di luar jadwal patroli yang sudah ditetapkan. Untuk meningkatkan efektivitas, Satpol PP juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi pengaduan masyarakat untuk memonitor patroli dan meningkatkan respons.

Namun, meskipun ada upaya untuk memastikan patroli sesuai jadwal, pelaksanaan terkadang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, seperti laporan mendadak terkait masalah ketertiban. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas, tetapi juga menunjukkan bahwa konsistensi dalam penjadwalan patroli masih perlu diperbaiki.

Masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL) menyatakan bahwa mereka merasakan adanya ketidakkonsistenan waktu patroli, yang menyebabkan mereka kesulitan menyesuaikan diri. Dengan demikian, meskipun indikator tepat waktu sangat penting, implementasinya dalam program ini masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Namun, meskipun ada upaya untuk memastikan patroli sesuai jadwal, pelaksanaan terkadang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, seperti laporan mendadak terkait masalah ketertiban. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas, tetapi juga mengindikasikan bahwa konsistensi dalam penjadwalan patroli belum sepenuhnya optimal. Masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL) menyatakan bahwa mereka merasakan adanya ketidakkonsistenan waktu patroli, yang menyebabkan mereka kesulitan menyesuaikan diri.

Dengan demikian, meskipun indikator tepat waktu sangat penting, implementasinya dalam program ini masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Sebagai hasilnya, indikator tepat waktu dalam pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu di Kecamatan Pulo Gadung belum sepenuhnya optimal dan membutuhkan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

d) Tercapainya Tujuan

Program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Pulo Gadung dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Satpol PP, TNI, POLRI, dan Dinas Perhubungan. Tujuan utama program ini adalah untuk mencegah gangguan ketertiban, mengurangi pelanggaran, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian tujuan tersebut tidak sepenuhnya optimal, karena masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Beberapa informan dari Satpol PP mengungkapkan adanya kemajuan yang signifikan, seperti pengurangan pelanggaran ketertiban dan peningkatan rasa aman di masyarakat. Namun, terdapat kendala dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak kooperatif. Meskipun patroli rutin dilakukan, banyak PKL yang tetap bertahan dan melanggar aturan, yang menyebabkan ketertiban di jalanan terganggu. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan program yang lebih luas.

Selain itu, tantangan lainnya adalah ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai tujuan preventif program ini, yang lebih banyak dilihat sebagai upaya penertiban daripada langkah pencegahan. Beberapa pedagang kaki lima juga merasa terbebani dengan penertiban yang dilakukan, meskipun mereka menyadari tujuan program ini untuk menciptakan ketertiban.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat dampak positif dari program Sipamanpadu, pencapaiannya masih memerlukan upaya yang lebih konsisten dan peningkatan pemahaman serta kerjasama antara instansi terkait dan masyarakat, terutama dalam menangani masalah PKL. Program ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, dan masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut serta perbaikan dalam pelaksanaannya.

e) Perubahan Nyata

Perubahan nyata dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari implementasinya, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan di masyarakat. Program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kecamatan Pulo Gadung memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman umum. Namun, keberhasilan program ini juga harus diukur berdasarkan perubahan yang terjadi di lapangan, seperti penurunan pelanggaran atau peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Satpol PP di Pulo Gadung menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai masalah sosial seperti tawuran, pedagang kaki lima (PKL), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sering kali mengganggu ketertiban. Program ini membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara.

Beberapa indikator perubahan nyata yang menjadi acuan adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, penurunan jumlah pelanggaran, keberlanjutan dampak dari tindakan penertiban, dan efektivitas program pembinaan sosial. Meskipun sejumlah langkah telah diambil, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Sebagai contoh, meskipun patroli dilakukan secara rutin, masalah tawuran antar pelajar masih sering terjadi, dan PKL sering kali kembali berjualan di lokasi yang sama setelah ditertibkan.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi masih bersifat sementara dan belum berkelanjutan. Selain itu, meskipun ada beberapa perbaikan, tantangan tetap ada, seperti kurangnya integrasi indikator perubahan dalam evaluasi rutin dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Satpol PP. Keberhasilan program ini dalam memberikan perubahan nyata yang mendukung efektivitas program Sipamanpadu masih dikatakan belum optimal perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam mencapai perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

2. Hambatan yang terjadi dalam efektivitas pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kecamatan Pulo Gadung bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan melalui patroli rutin. Meskipun tujuan program ini baik, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, termasuk masalah koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan tantangan struktural serta sosial yang sulit diatasi. Untuk memahami hambatan-hambatan tersebut, dilakukan wawancara dengan petugas Satpol PP dan masyarakat yang merasakan dampaknya, yang mengungkapkan berbagai masalah yang menghambat efektivitas program ini.

a) Pemahaman program

Pemahaman yang jelas tentang program sangat penting untuk mencapai tujuan sistem patroli dan keamanan terpadu (Sipamanpadu). Namun, di lapangan, banyak masyarakat yang hanya melihat program ini dari sisi penertiban tanpa memahami aspek preventifnya, seperti patroli dan edukasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan komunikasi yang tidak optimal antara petugas dan masyarakat. Upaya sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami tujuan sebenarnya dari program ini, tidak hanya dari perspektif penertiban, melainkan juga sebagai langkah pencegahan untuk menciptakan ketertiban yang lebih baik.

b) Tepat Sasaran

Keberhasilan program juga sangat bergantung pada sejauh mana sasaran program tercapai, baik dalam hal lokasi patroli yang tepat atau prioritas penanganan masalah. Namun, keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan jumlah petugas menjadi hambatan utama dalam memastikan pelaksanaan program ini tepat sasaran. Patroli yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan waktu rawan pelanggaran, dan keterbatasan personel menyebabkan pengawasan menjadi tidak merata. Selain itu, koordinasi yang kurang baik antara petugas dan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas program. Beberapa masalah, seperti tawuran dan gangguan lainnya, tidak segera ditangani karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada petugas. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penentuan waktu patroli, pembagian sumber daya yang lebih merata, serta peningkatan koordinasi antara pihak terkait agar program ini dapat lebih tepat sasaran.

c) Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program Sipamanpadu menjadi salah satu tantangan utama. Hambatan yang sering terjadi meliputi gangguan lalu lintas, cuaca buruk, serta keterbatasan jumlah personel yang menyebabkan ketidaksesuaian jadwal patroli. Hal ini menghambat upaya untuk menanggulangi pelanggaran pada waktu yang tepat. Selain itu, laporan mendadak dari masyarakat juga sering kali mengubah jadwal patroli yang telah direncanakan, sehingga menyebabkan gangguan dalam respons yang optimal. Meskipun demikian, petugas tetap berusaha untuk memberikan respons cepat meskipun terdapat kendala teknis dan eksternal.

d) Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan program Sipamanpadu juga menghadapi hambatan besar. Beberapa tantangan yang muncul termasuk ketidakkooperatifan Pedagang Kaki Lima (PKL), keterbatasan personel, serta kurangnya fasilitas penampungan bagi PMKS. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya koordinasi antar instansi juga menjadi penghambat. Hal ini menyebabkan pencapaian tujuan program dalam menciptakan ketertiban dan keamanan yang lebih baik tidak dapat tercapai secara optimal. Dalam beberapa kasus, meskipun patroli rutin dilakukan, masalah tetap terjadi akibat kurangnya dukungan dari pihak terkait dan masyarakat.

e) Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata yang diharapkan dari program Sipamanpadu, seperti peningkatan rasa aman, pengurangan kriminalitas, dan tertibnya penggunaan ruang publik, belum sepenuhnya tercapai. Hambatan utama dalam hal ini adalah keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat terhadap penertiban, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Penertiban terhadap PKL, misalnya, sering kali bersifat sementara karena mereka kembali berjualan setelah patroli selesai. Selain itu, masalah sosial dan ekonomi yang mendasari pelanggaran, seperti kemiskinan dan pengangguran, belum dapat diselesaikan dengan tindakan penertiban yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk menciptakan perubahan, dampaknya belum cukup signifikan dan berkelanjutan.

3. Upaya yang harus di lakukan dalam mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Setelah mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program Sipamanpadu oleh Satpol PP di Kecamatan Pulo Gadung, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Hambatan yang mencakup pemahaman program oleh petugas dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta resistensi terhadap penertiban, memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek. Upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penataan sistem yang lebih efektif. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah memastikan program dapat meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara optimal.

1. Pemahaman program

Pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan mekanisme program sangat penting bagi efektivitas pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman di kalangan petugas dan masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sipamanpadu. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman dilakukan melalui berbagai pendekatan edukatif, seperti pelatihan untuk petugas Satpol PP dan sosialisasi melalui media sosial, spanduk, serta pertemuan langsung dengan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami bahwa tujuan program ini bukan hanya penertiban, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bersama.

2. Tepat Sasaran

Untuk memastikan program Sipamanpadu tepat sasaran, penting untuk melakukan pemetaan wilayah dan kelompok yang membutuhkan penertiban dan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi edukasi kepada pedagang kaki lima dan penggunaan teknologi seperti CCTV untuk memantau titik rawan. Selain itu, penyesuaian jadwal patroli berdasarkan data pelanggaran dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait juga diperkenalkan untuk memfokuskan perhatian pada lokasi yang membutuhkan pengawasan lebih.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan Sipamanpadu sangat krusial untuk mencegah gangguan keamanan. Hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan laporan mendadak, memerlukan sistem prioritas dalam penanganan masalah. Oleh karena itu, pelatihan untuk meningkatkan efisiensi waktu kerja dan penggunaan teknologi untuk koordinasi yang lebih cepat menjadi solusi untuk memastikan patroli dilaksanakan sesuai jadwal. Penyesuaian jadwal patroli dan komunikasi dengan masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan respons terhadap situasi mendesak.

4. Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi. Salah satu indikator utama efektivitas program ini adalah apakah tujuan-tujuan seperti menciptakan ketertiban, mengurangi tindak kriminalitas, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dapat tercapai. Namun, hambatan terkait koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu sering menghalangi pencapaian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar tujuan program dapat terlaksana dengan baik. Upaya-upaya tersebut meliputi pendekatan persuasif, penguatan koordinasi antar instansi terkait, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

5. Perubahan Nyata

Terkait dengan perubahan nyata, meskipun berbagai langkah telah dilakukan untuk mengatasi hambatan, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Indikator perubahan

nyata, seperti penurunan angka tawuran, pengurangan aktivitas pedagang kaki lima yang melanggar aturan, dan meningkatnya rasa aman warga, masih belum sepenuhnya terwujud. Upaya untuk mencapai perubahan nyata harus mencakup pendekatan terintegrasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyediakan solusi jangka panjang bagi pedagang kaki lima, seperti tempat berdagang yang lebih terorganisir, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung program ini. Dengan demikian, diharapkan program Sipamanpadu dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan serta mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Patroli Dan Keamanan Terpadu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur belum dapat efektif karena masyarakat kurang memahami tujuan dan mekanisme program patroli serta keterbatasan sumber daya dan penegakan hukum yang tidak konsisten menghambat pencapaian tujuan. Meskipun ada upaya untuk mengikuti jadwal patroli, ketidakkonsistenan dan penyesuaian terhadap kondisi lapangan masih menjadi tantangan dalam penentuan ketetapan waktu pelaksanaan patroli. maka dari itu Perubahan nyata yang dihasilkan dari program Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu belum sepenuhnya optimal mengingat Beberapa masalah seperti tawuran dan keberadaan PKL yang kembali berjualan di lokasi yang sama menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi masih bersifat sementara.
2. Hambatan yang terjadi dalam efektivitas pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu (Sipamanpadu) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas program ini, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang aspek preventif program, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu, serta masalah koordinasi yang tidak optimal. Ketidaksesuaian waktu patroli, gangguan eksternal, dan ketidakkooperatifan beberapa pihak, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), juga menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai tujuan program. Meskipun ada upaya untuk menciptakan perubahan, hasil yang diharapkan, seperti peningkatan rasa aman dan pengurangan pelanggaran, belum sepenuhnya tercapai dan dampaknya masih bersifat sementara.
3. Upaya yang harus di lakukan dalam mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan sistem patroli dan keamanan terpadu oleh satuan polisi pamong praja di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur meliputi peningkatan pemahaman program di kalangan petugas dan masyarakat, penataan jadwal patroli yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, penting untuk memperkenalkan teknologi seperti CCTV dan sistem prioritas dalam penanganan masalah keamanan. Peningkatan fleksibilitas waktu patroli dan pendekatan persuasif terhadap masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, juga diperlukan untuk mencapai tujuan program. Untuk mencapai perubahan nyata yang berkelanjutan, perlu ada solusi jangka panjang bagi PKL dan edukasi yang lebih intensif untuk memperkuat partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan ketertiban dan rasa aman yang optimal.

2. Saran

Saran untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan masyarakat, dalam mendukung pelaksanaan Sistem Patroli dan Keamanan Terpadu di Kecamatan Pulo Gadung adalah sebagai berikut:

1. Bagi satuan polisi pamong praja di harapkan mampu Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Satpol PP, masyarakat, dan instansi terkait guna memperbaiki pemahaman program dan

meningkatkan efektivitas patroli. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai tujuan program Sipamanpadu agar masyarakat setidaknya 2-3 kali dalam sebulan untuk memahami pentingnya langkah preventif dan bukan hanya penindakan.

2. Bagi pemimpin satuan polisi pamong praja di harapkan dapat menambah sumber daya manusia sebanyak 5 satpol PP dalam setiap regu patroli dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan patroli yang lebih merata dan konsisten sesuai waktu rawan pelanggaran. Serta Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memonitor jadwal patroli dan laporan dari masyarakat agar respons lebih cepat dan tepat waktu.
3. Bagi masyarakat di harapkan dapat Meningkatkan partisipasi aktif dalam mendukung program Sipamanpadu, seperti melaporkan kejadian yang mengganggu ketertiban secara tepat waktu kepada petugas, Menghargai peraturan dan tata tertib yang ditetapkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta memahami pentingnya langkah preventif yang dilakukan oleh Satpol PP. dan Berperan serta dalam sosialisasi program Sipamanpadu agar tidak hanya mengandalkan Satpol PP, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang menjaga ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abd Rachman Syah Yusuf, 2021, Efektivitas Tugas Pegawai dalam pelayanan publik (Pada Kantor Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari),
- Agustino, Leo, 2018. Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Cetakan Kedua,. Alfabeta, Bandung
- Ali Muhidin Sambas, 2020, Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka. Setia,Bandung.
- Budi Winarno, 2022. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi. Revisi),Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Campbell, N.A.(2019). Biologi Edisi Kelima jilid II. Jakarta: Erlangga.
- Edy, Sutrisno. 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit: Jakarta,. Kencana
- Handoko, T. Hani. 2020. Manajemen. Yogyakarta : BPFE.
- Helaluddin & Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 2019.
- Islamy, M. Irfan. 2019. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika.
- Krech, D. (2019). Individual in society: Text book of social psychology / by David. Krech, Richard S. Crutchfield and Egerton L. Ballachey
- Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Mulyasa. (2023). Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Remaja. Rosdakarya
- Mutiarin, Dyah dan Zaenudin Arif. (2022). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana, Nana. 2016. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edy. 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syamsuddin, L. 2018. Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi Baru.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan,2013. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus,. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI. Sutedi , 2018

Jurnal

- Ajudalastri, Krisnawati. 2021. Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit. Studi Kasus pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk
- Altharez (2018) Effectivity Of Management Applications In Supporting Patrol
- Habibi, R., & Aprilian, R. (2020). Tutorial dan penjelasan aplikasi e-office berbasis web menggunakan metode RAD. Kreatif Industri Nusantara, Bandung .
- Imra Atul Husna Lukra (2019) Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
- Jurnal LPPM Bidang EkosSosBudKum, 1(Nomor 1), 96. Jibril, A. (2017). Efektivitas Program Perpuseru di Perpustakaan Umum. Page 3. 78.
- Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 1(2), 143–161. Kotler dan Keller. 2022. Manajemen pemasaran. Edisi 12. Jakarta : Erlangga.
- Maris Gunawan Rukmana (2020) Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung
- Marwah dkk (2019) Efektivitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang
- Nurudin Siraj (2018) Efektivitas Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah)
- Viqi Martin (2018) Effectivity of Control Policies Street Vendors by the Public Order and Peace Division of the Police Unit

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014